

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Proses Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi Secara Umum

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, serta melaporkan kejadian/transaksi keuangan sebuah entitas kepada pengguna laporan keuangan (Siswanto & Suhendra, 2020). Menurut Warren *et al.* (2009) akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2019) berpendapat bahwa akuntansi merupakan ilmu dalam mencatat, menganalisis, dan mengomunikasikan transaksi dan kejadian ekonomi suatu entitas bisnis. Tujuan akuntansi sendiri adalah menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Pengertian akuntansi dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dari kejadian, transaksi, atau kegiatan operasi suatu organisasi agar menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak pengguna (Suwardjono, 2010).

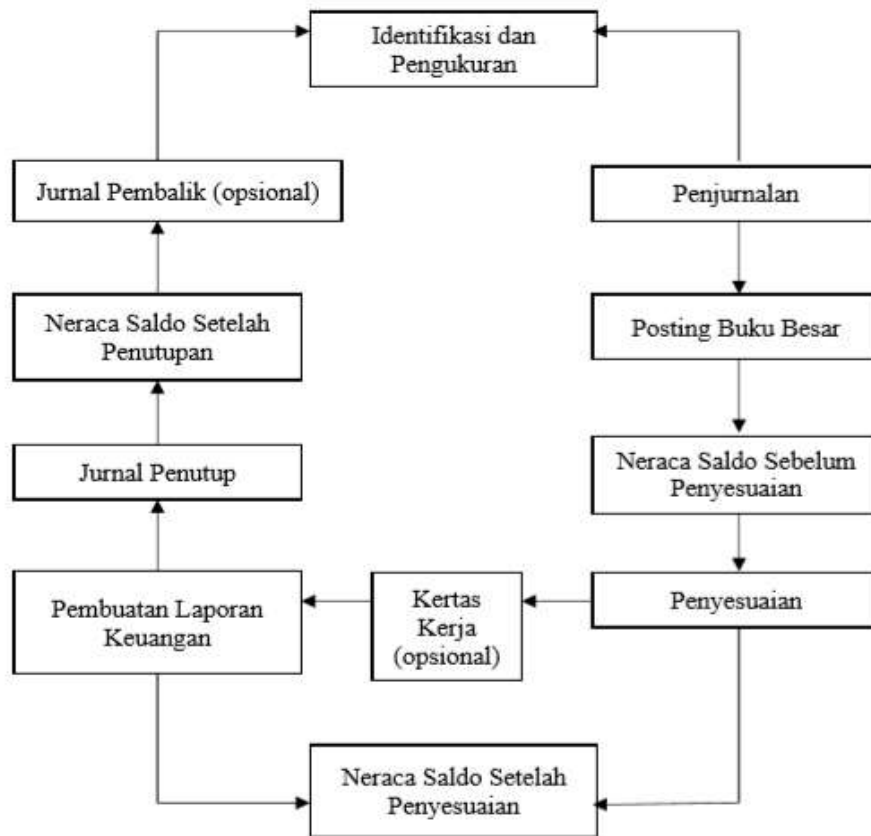
Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian tersebut bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, dan melaporkan data keuangan dari kejadian/transaksi suatu organisasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Siklus Akuntansi

Rangkaian proses akuntansi yang dimulai dari proses pengidentifikasian transaksi dan pencatatan transaksi sampai dengan penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dapat disebut dengan siklus akuntansi (Biswan & Mahrus, 2020). Sementara itu, Siswanto & Suhendra (2020) menjelaskan bahwa siklus akuntansi dapat diuraikan menjadi tiga proses. Proses pertama yaitu proses identifikasi yang merupakan analisis transaksi atau kejadian yang terjadi pada suatu entitas. Proses kedua yaitu mencatat tiga kegiatan seperti jurnal atas transaksi, mengklasifikasikan catatan-catatan jurnal ke dalam buku besar, dan neraca saldo. Proses terakhir adalah mengomunikasikan yang dapat dirinci menjadi beberapa aktivitas yaitu mengikhtisarkan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah saldo akun-akun di akhir periode pelaporan keuangan, melakukan penyesuaian yang bertujuan untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya, menyusun laporan keuangan, serta melakukan penutupan terhadap pencatatan dengan menutup akun-akun yang termasuk dalam kategori temporer/akun laba rugi.

Singkatnya menurut Martani *et al.* (2017) siklus akuntansi merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna sebagai alat pengambil keputusan. Siklus akuntansi dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut.

Gambar II.1 Siklus Akuntansi



Sumber: diolah dari Kieso *et al.* (2018)

2.2 Organisasi Nirlaba

2.2.1 Definisi Organisasi Nirlaba

Secara umum definisi organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang dalam operasional dan tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan (Religa, 2022). Organisasi nirlaba merupakan suatu entitas yang didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari laba (Setiadi, 2021).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya yang

mana letak perbedaannya terdapat pada tujuannya. Tujuan dari organisasi nirlaba adalah membantu masyarakat dengan tanpa mencari laba sedangkan organisasi bisnis biasanya berorientasi pada laba.

Karakteristik organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba disajikan pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik	Keterangan
Sumber Dana	Sumber daya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
Tujuan	Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan mengumpulkan laba. Apabila entitas nirlaba menghasilkan laba, jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik.
Kepemilikan	Tidak ada kepemilikan yang artinya kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ataupun ditebus kembali.

Sumber: diolah dari IAI (2010)

2.2.2 Akuntansi Organisasi Nirlaba

Setiadi (2021) berpendapat bahwa sumber dana dari organisasi nirlaba pada umumnya berasal dari yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang diberikannya. Oleh karena itu, organisasi nirlaba dan para pengurusnya berdasarkan prinsip akuntabilitas perlu menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba. Alasan dari penyajian laporan keuangan tersebut karena dengan laporan keuangan dapat dilihat pertanggungjawaban dari pengurus organisasi nirlaba atas dana para donatur.

Sehubungan dengan pengertian akuntansi dan organisasi nirlaba dapat ditarik kesimpulan akuntansi organisasi nirlaba adalah proses mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, dan melaporkan data keuangan dari kejadian/transaksi suatu organisasi dengan orientasi nonlaba yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap donatur atau pemberi modal. Akuntansi organisasi nirlaba dalam penyusunan laporan keuangannya harus berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

2.3 Akuntansi Masjid

2.3.1 Pengertian Akuntansi Masjid

Sitompul *et al.* (2015) menjelaskan bahwa kaidah akuntansi menurut konsep Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen dari sumber syariah islam yang dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, serta menjadi dasar dalam menjelaskan suatu peristiwa.

Akuntansi masjid merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan masjid yang dapat digunakan sebagai alat dalam pengambil keputusan (Sari & Susilowati, 2021).

Masjid adalah salah satu contoh organisasi nirlaba yang digunakan sebagai tempat ibadah untuk masyarakat muslim. Selain digunakan untuk beribadah, masjid juga digunakan sebagai tempat silaturahmi antar umat islam, tempat berbagi ilmu agama, dan kegiatan keagamaan lainnya (Setiadi, 2021).

ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba ini mulai berlaku efektif pada tahun buku 1 Januari 2020. Sebelum pemberlakuan ISAK 35 ini, akuntansi organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 45. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada klasifikasi aset neto yang akan membawa pemahaman yang lebih baik bagi pengguna laporan keuangan entitas nirlaba. Adapun ISAK 35 menyebutkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3.2 Penerapan Akuntansi Masjid

Bastian (2007, dikutip dalam Sari & Susilowati, 2021) memberikan pernyataan bahwa dalam hal pertanggungjawaban akuntabilitas terdapat dua jenis akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horizontal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, sedangkan akuntabilitas vertikal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Hal ini berlaku pada penerapan akuntansi masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid, otoritas yang lebih tinggi disini dalam bentuk spiritual.

Sari & Susilowati (2021) juga memberikan pendapat bahwa akuntabilitas yang diberikan kepada pengurus masjid adalah berupa pencatatan keuangan yang jelas, baik, dan jujur walaupun dengan penyajian yang sederhana.

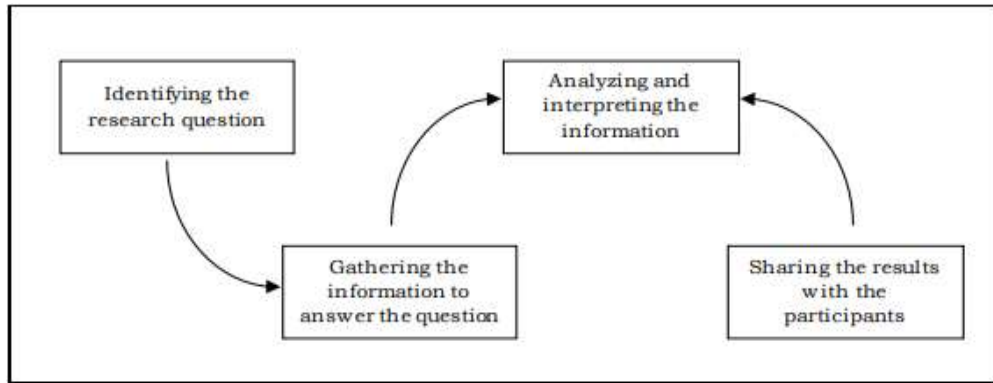
2.4 Metode Penelitian *Participatory Action Research* (PAR)

Menurut Lune & Berg (2017) metode *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian yang peneliti dan masyarakatnya membentuk hubungan sosial serta melakukan aksi nyata untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan. Pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas perlu berperan aktif atau berpartisipasi dalam mengubah dan saling memperbaiki kondisi mereka.

Lune & Berg (2017) memberikan argumentasi tentang prosedur PAR yang melibatkan empat tahapan. Tahapan pertama yaitu *identifying the research question* yang merupakan tahapan mengidentifikasi masalah dan menjadikannya perhatian sehingga permasalahan tersebut menjadi penting untuk semua pemangku kepentingan. Tahapan kedua yaitu *gathering the information to answer the question* yang bertujuan untuk mencari data terkait permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya dan data yang dimaksud dapat berupa hasil dari wawancara dengan pihak yang bersangkutan ataupun data lainnya. Tahapan ketiga adalah *analyzing and interpreting the information* yang merupakan tahapan mengolah data yang sudah diperoleh dengan tujuan menilai hasil analisis data dan menjelaskan atas hasil yang sudah diperoleh. Tahapan terakhir adalah *sharing the results with the participants* yang bertujuan untuk menginformasikan hasil analisis baik secara formal maupun nonformal dengan memberikan penjelasan langsung terkait analisis yang berfungsi untuk mengukur apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dan dapat membuat perubahan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun empat tahapan metode PAR diatas dapat dijelaskan dengan Gambar II.2 berikut.

Gambar II.2 Tahapan *Participatory Action Research*



Sumber: diolah dari Lune & Berg (2017)